

## Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS di Kelurahan Kalisari Jakarta Timur

Amalia Ulul ' Azmi<sup>1</sup>, Tamri<sup>2</sup>  
Universitas Respati Indonesia  
Email : [amalia\\_ulul78@gmail.com](mailto:amalia_ulul78@gmail.com)

### ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau yang biasa dikenal dengan BPJS adalah salah satu program yang dicanangkan pemerintah guna untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini diharapkan semua lapisan masyarakat khususnya pada masyarakat yang berprofesi wirausaha. Melihat masih banyaknya masyarakat yang berprofesi wirausaha yang belum menggunakan BPJS bisa dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pendidikan , pengetahuan , penghasilan, keterpaparan informasi dan sikap kepala keluarga yang menjadi faktor masyarakat yang berprofesi wirausaha tidak mengikuti jaminan kesehatan nasional BPJS. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat yang berprofesi wirausaha di kelurahan Kalisari Jakarta Timur Tahun 2017. Penelitian dilakukan di wilayah kelurahan kalisari pada bulan Juli-Agustus 2017 ± 290 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Analisa data dengan univariat yaitu untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan bivariat yaitu untuk mengetahui hubungan masing-masing yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel pengetahuan (*p value* 0,028), variabel penghasilan (*p value* 0,009), variabel keterpaparan informasi (*p value* 0,024). Saran yang diberikan kepada pihak BPJS untuk mensosialisasi secara menyeluruh terkait informasi BPJS khususnya di wilayah kalisari sehingga hal ini menjadi faktor yang mendorong masyarakat yang berprofesi wirausaha untuk mau mengikutsertakan dirinya beserta keluarganya agar terjamin kesehatannya.

**Kata kunci** : Keikutsertaan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

### ABSTRACT

Health Insurance Provider Board or commonly known as BPJS is one of the programs launched by the government in order to prosper Indonesian people. With the existence of the Social Security Organizing Agency (BPJS), it is expected that all levels of society, especially in the community who are entrepreneurs. Seeing that there are still many people who are entrepreneurs who have not used BPJS, it can be caused by several factors including factors of education, knowledge, income, information exposure and attitude of the head of the family who are factors in the community of entrepreneurs who do not follow BPJS national health insurance. The purpose of this study was to determine the factors associated with the participation of people who are entrepreneurs in the Kalisari village, East Jakarta in 2017. The research was conducted in the Kalisari kelurahan in July-August 2017 ± 290 people. The sample in this study were 100 respondents. Univariate data analysis is to find out the frequency distribution and bivariate description, namely to find out the relationship of each that has a significant relationship with the knowledge variable (*p value* 0,028), income variable (*p value* 0.009), information exposure variable (*p value* 0.024) . Suggestions given to the BPJS to socialize

thoroughly related to BPJS information, especially in the Kalisari region so that this becomes a factor that encourages the entrepreneurial community to want to include themselves and their families to ensure their health.

**Keywords :** Participation - Social Security Organizing Agency

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia untuk mencapai hidup yang sejahtera, karena segala aktivitas manusia tidak akan berjalan dengan baik apabila manusia itu sendiri tidak mempunyai kesehatan yang baik. Setiap negara pasti mempunyai cita-cita untuk menjadikan masyarakatnya hidup sejahtera, melalui penjaminan atas kesehatan masyarakatnya. Oleh karena itu mendapatkan kesehatan adalah hak bagi setiap manusia sebagai warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang Undang.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia, dengan dibentuknya Program Jaminan Kesehatan (JKN) yang merupakan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan hukum yang mengatur mengenai SJSN adalah UU No. 40 Tahun 2004. Badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan JKN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan merupakan suatu badan publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dimana BPJS Kesehatan merupakan bagian dari BPJS sendiri. BPJS Kesehatan memulai pelaksanaannya pada tanggal 1 Januari 2014 melalui PT. ASKES yang per tanggal 1 Januari berubah namanya menjadi BPJS Kesehatan dimana UU BPJS memberikan kekeluasaan kepada PT. ASKES melalui masa peralihan terhitung mulai 26 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Sejak dimulainya pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) masih banyak permasalahan yang ditemui, tetapi peneliti merasa tertarik

untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi dimana jumlah peserta BPJS masih rendah dari total keseluruhan penduduk, baik peserta BPJS Kesehatan PBI dan Non PBI. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyebab dan faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut dilihat dari pendidikan, pengetahuan, penghasilan perbulan dan sikap kepala keluarga.

Kelurahan kalisari merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, yang memiliki jumlah penduduk ± 48.376 jiwa, dengan penduduk Laki – laki berjumlah 24.373 jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 24.003 jiwa. Adapun jumlah 13.350 KK, terdiri atas kepala keluarga laki-laki berjumlah 11.459 KK dan kepala keluarga wanita berjumlah 1.891 KK. Kelurahan Kalisari memiliki 11 RW dan 103 RT. Dengan total masyarakat berprofesi wirausaha sebanyak 290 KK.

Berdasarkan observasi serta studi pendahuluan yang penulis lakukan di lapangan dengan dibantu oleh kader organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) peneliti mewawancarai 10 narasumber masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta didapatkan bahwa 6 dari 10 narasumber belum menggunakan BPJS sebagai Jaminan Kesehatan, sehingga 6 penduduk tersebut menggunakan dana pribadi untuk melakukan pengobatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit.

Adapun 4 dari 10 penduduk sudah menggunakan BPJS sehingga ketika 4 penduduk tersebut melakukan pengobatan sudah sedikitnya tercover dengan menggunakan pelayanan BPJS.

Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS dapat di pengaruhi oleh beberapa hal. Penelitian oleh salma binti purwaningsih (2016) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan, dan peran informasi terhadap keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Johariyah (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara status ekonomi, serta Pendidikan dengan keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisari Jakarta Timur maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS di Kelurahan Kalisari Jakarta Timur 2017.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data

numeric (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 1999). Jenis penelitian yang digunakan adalah *cross sectional*. Pengumpulan data ini dilakukan di wilayah Kelurahan Kalisari Jakarta Timur. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2017. Populasi dalam

penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi wiraswasta di wilayah Kelurahan Kalisari dengan jumlah populasi sebesar 290 KK yang terbagi dalam 11 RW di Kelurahan Kalisari pada Tahun 2017. Dengan jumlah sampel 100 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
Hasil Analisis Univariat

Variabel	Jumlah (n)	Presentase (%)
<b>Keikutsertaan BPJS</b>		
Tidak Iya	58	58 %
Iya	42	42 %
<b>Tingkat Pendidikan Responden</b>		
Pendidikan Rendah	45	45 %
Pendidikan Tinggi	55	55 %
<b>Tingkat Pengetahuan Responden</b>		
Pengetahuan Rendah	45	45 %
Pengetahuan Tinggi	55	55 %
<b>Tingkat Penghasilan perbulan Responden</b>		
Rendah	70	70 %
Tinggi	30	30 %
<b>Tingkat Keterpaparan Informasi Responden</b>		
Tidak Terpapar	30	30 %
Terpapar	70	70 %
<b>Tingkat Sikap Kepala Keluarga Responden</b>		
Tidak Mendukung	62	62 %
Mendukung	38	38 %

**Tabel 2**  
Hasil Analisis Bivariat

Variabel	Keikutsertaan JKN BPJS				Total	P Value	OR (95%)
	Tidak		Iya				
	n	%	n	%			
<b>Tingkat Pendidikan</b>							
Rendah	30	66,7%	15	33,3%	45	100%	0,166 1,929 (0,854 -4,355)
Tinggi	27	49,1%	28	50,9%	55	100%	

---

**Tingkat Pengetahuan**

Rendah	32	71,1%	13	28,9%	45	100%	0,028	2,746 (1,192 – 6,322)
Tinggi	26	47,3%	29	52,7%	55	100%		

**Tingkat Penghasilan**

Rendah	47	67,1%	23	32,9%	70	100%	0,009	3,530 (1,443 – 8,634)
Tinggi	11	36,7%	19	63,3%	30	100%		

**keterpaparan Informasi**

Tidak Terpapar	23	76,7%	7	23,3%	30	100%	0,024	3,286 (1,249 – 8,643)
Terpapar	35	50 %	35	50%	70	100%		

**Sikap**

Tidak Mendukung	40	64,5%	22	35,5%	77	100%	0,139	2,020 (0,88– 4,597)
Mendukung	18	47,4%	20	52,6%	38	100%		

---

**Hubungan pendidikan dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS**

Berdasarkan penelitian bahwa masyarakat yang berprofesi wirausaha menurut tingkat pendidikannya, ditemukan tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dengan nilai ( $p= 0,166$ ).

Dalam kondisi ini terlihat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan, dikarenakan meskipun mempunyai sikap positif yang tinggi, tapi responden tidak berminat mengikuti JKN.

Hal ini sesuai dengan pendapat I.A Putri Widhiastuti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Persepsi Manfaat dengan Kepesertaan JKN Secara Mandiri di Puskesmas I Denpasar Timur”, yang mengemukakan dalam penelitiannya bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan keikutsertaan dalam program JKN BPJS.

**Hubungan pengetahuan dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS**

Pengetahuan yang tinggi dipengaruhi dengan tingkat pendidikan

seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang akan jelas mempengaruhi pribadi seseorang ketika berfikir, berpendapat maupun dalam mengambil keputusan ataupun tindakan. Salah satunya dalam merencanakan kesehatan dalam mengikuti program JKN BPJS. Hal ini dibuktikan juga oleh peneliti ( $p=0,028$ ) dimana terdapat hubungan antara pengetahuan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam program JKN BPJS.

Pengetahuan yang baik didukung dengan sikap positif yang dimiliki oleh responden, maka akan berfikir untuk melakukan pencegahan terhadap risiko sakit yaitu dengan mengikuti JKN kemudian juga akan sukarela membayar iuran JKN.

Hubungan ini juga sependapat dengan penelitian salma binti purwaningsih (2016) tentang “faktor – faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional didesa tegalsari kabupaten ponorogo” dimana ( $p=0,000$ ) yang berarti menunjukkan ada hubungan yang bermakna antar pengetahuan dengan keikutsertaan masyarakat dalam JKN BPJS.

#### **Hubungan penghasilan dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa penghasilan menentukan keikutsertaan JKN BPJS, dimana responden dengan penghasilan

tinggi cenderung memilih mengikuti JKN BPJS. Berbeda dengan responden dengan penghasilan rendah dengan pengetahuan kurang ataupun tidak didukung dengan penghasilan yang cukup mereka akan lebih memperhitungkan untuk mengikuti JKN karena penghasilan akan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan ( $p=0,009$ ) bahwa menunjukkan adanya hubungan antara penghasilan dengan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN BPJS penelitian ini juga didukung dengan penelitian oleh salma binti purwaningsih (2016) tentang “faktor – faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional didesa tegalsari kabupaten ponorogo” dimana ( $p=0,027$ ) dimana menunjukkan ada hubungan.

#### **Hubungan keterpaparan informasi dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS**

Berdasarkan kenyataan lapangan, responden yang terpapar informasi antara mau tidak nya mengikuti BPJS sama besarnya yaitu 50 %, berbeda dengan responden yang tidak terpapar informasi hanya 23,3 % yang mengikuti JKN BPJS, faktor ini terjadi karena dipengaruhi oleh pengetahuan, dimana cara berfikir responden yang terpapar informasi lebih luas mengetahui informasi mengenai JKN

BPJS sehingga responden banyak yang memilih mengikuti JKN BPJS. Berbeda dengan responden yang tidak terpapar informasi mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai BPJS dan kurangnya informasi mengenai BPJS sehingga tingkat keikutsertaannya sedikit.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan antara keterpaparan informasi dengan keikutsertaan JKN BPJS dengan  $p=0,024$ , ini menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan informasi cukup banyak sehingga dari informasi tersebut responden mau menggunakan BPJS sebagai asuransi kesehatannya.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat hubungan antara keterpaparan informasi dengan keikutsertaan JKN BPJS yaitu ( $p=0,018$ ) dan penelitian ini didukung oleh salma binti purwaningsih (2016) tentang “faktor – faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional didesa tegalsari kabupaten ponorogo” dimana ( $p=0,026$ ) dimana menunjukkan ada hubungan.

#### **Hubungan sikap kepala keluarga dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS**

Hasil uji bivariat yang telah dilakukan peneliti diketahui nilai ( $p=0,139$ ) lebih dari ( $p=0,05$ ) didapatkan bahwa tidak

terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan keikutsertaan BPJS.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh sikap kepala keluarga terhadap keikutsertaan JKN BPJS tidak ada pengaruhnya, dikarenakan meskipun masyarakat mempunyai sikap positif yang tinggi, tetapi mereka tidak berminat untuk mengikuti program JKN BPJS pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan Desy Rohmawati (2014) bahwa peranan sikap di dalam kehidupan manusia berperan besar, sebab apabila sudah dibentuk pada diri manusia, maka sikap itu akan turut menemukan ciri-ciri tingkah laku seseorang dalam bertindak.

#### **SIMPULAN**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis didapatkan masyarakat wirausaha yang tidak menjadi peserta BPJS sebanyak 58 % dan masyarakat wirausaha yang menjadi peserta BPJS sebanyak 42 % di wilayah kelurahan Kalisari.
2. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang berhubungan dengan keikutsertaan JKN BPJS yaitu; pengetahuan, penghasilan, dan keterpaparan informasi dan 2 variabel yang tidak berhubungan

yaitu; pendidikan, dan sikap kepala keluarga

3. Pada penelitian ini diketahui pada variabel pengetahuan diperoleh nilai  $P \text{ Value} = 0,028$  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan keikutsertaan JKN BPJS. Dari hasil analisis juga didapatkan  $OR = 2,7$  artinya responden wirausaha yang memiliki pengetahuan tinggi bepeluang untuk mengikuti JKN BPJS 2,7 lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan rendah di wilayah kelurahan Kalisari.
4. Pada penelitian ini diketahui pada variabel penghasilan diperoleh nilai  $P \text{ Value} = 0,009$  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan keikutsertaan JKN BPJS. Dari hasil analisis juga didapatkan  $OR = 3,5$  artinya responden yang memiliki pengetahuan tinggi bepeluang untuk mengikuti JKN BPJS 3,5 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan rendah di wilayah kelurahan Kalisari.
5. Pada penelitian ini diketahui pada variabel keterpaparan informasi diperoleh nilai  $P \text{ Value} = 0,024 (0,05)$

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterpaparan informasi dengan keikutsertaan JKN BPJS. Dari hasil analisis juga didapatkan  $OR = 3,2$  artinya responden yang terpapar informasi berpeluang untuk mengikuti JKN BPJS 3,2 kali lebih besar dibandingkan responden yang tidak terpapar informasi di wilayah kelurahan Kalisari.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Depkes R.I. 2003. *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Depkes R.I.
2. Johariyah. 2016. *Analisis Keikutsertaan Bpjs "Mandiri" Berdasarkan Status Ekonomi, Sikap Dan Persepsi Atas Mutu Layanan*
3. Melinda. 2016. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan BPJS Mandiri di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*.
4. Notoatmodjo, Soekidjo, 2009. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
5. \_\_\_\_\_ 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

6. \_\_\_\_\_ 2011. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
7. \_\_\_\_\_ 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
8. Permenkes RI No. 69 Tahun 2013. Jakarta: Kemenkes. *Standar Tari Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan*.
9. Permenkes RI No. 71 Tahun 2013. Jakarta: Kemenkes. *Pelayanan Kesehatan pada JKN*.
10. Perpres. 2013. *Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*.
11. \_\_\_\_\_ *Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013*.
12. Purwaningsih, Salma Binti. 2016. *Faktor – faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan*.
13. Rohmawati, Desi. 2014. *Hubungan Pengetahuan Sikap dan Sosial Ekonomi dengan Pemilihan Jenis Iuran Keikutsertaan JKN Mandiri pada Wilayah Cakupan JKN Tertinggi di Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
15. Thabrany, Hasbullah. 2016. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta. Edisi Kedua: Jakarta: Rajawali Pers.
16. Tyas, Ika Ayuning. 2014. *Hubungan Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Kepala Keluarga Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta*.
17. RI. 2004. *Undang-Undang Rebpublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional-SJSN*.
18. RI. 2004. *Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
19. RI. 2009. *Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
20. RI. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor: 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*.
21. Widhiastuti, Putri. 2015. *Hubungan Persepsi Manfaat dengan Kepersertaan Secara Mandiri di Puskesmas I Denpasar Timur*.